

SKRIPSI

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA PAROMBEAN KECAMATAN  
CURIO KABUPATEN ENREKANG



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	10/09/2022
Nomor Surat	-
Jumlah copy	1 EXP
Harga	Sumbangan Altwis
Nama Instansi	-
No. Identifikasi	R/0107/1PM/2022 SHE K

**SKRIPSI**

**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA PAROMBEAN KECAMATAAN  
CURIO KABUPATEN ENREKANG**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SHELSI ANUGRA

Nomor Induk Mahasiswa : 105641108618

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

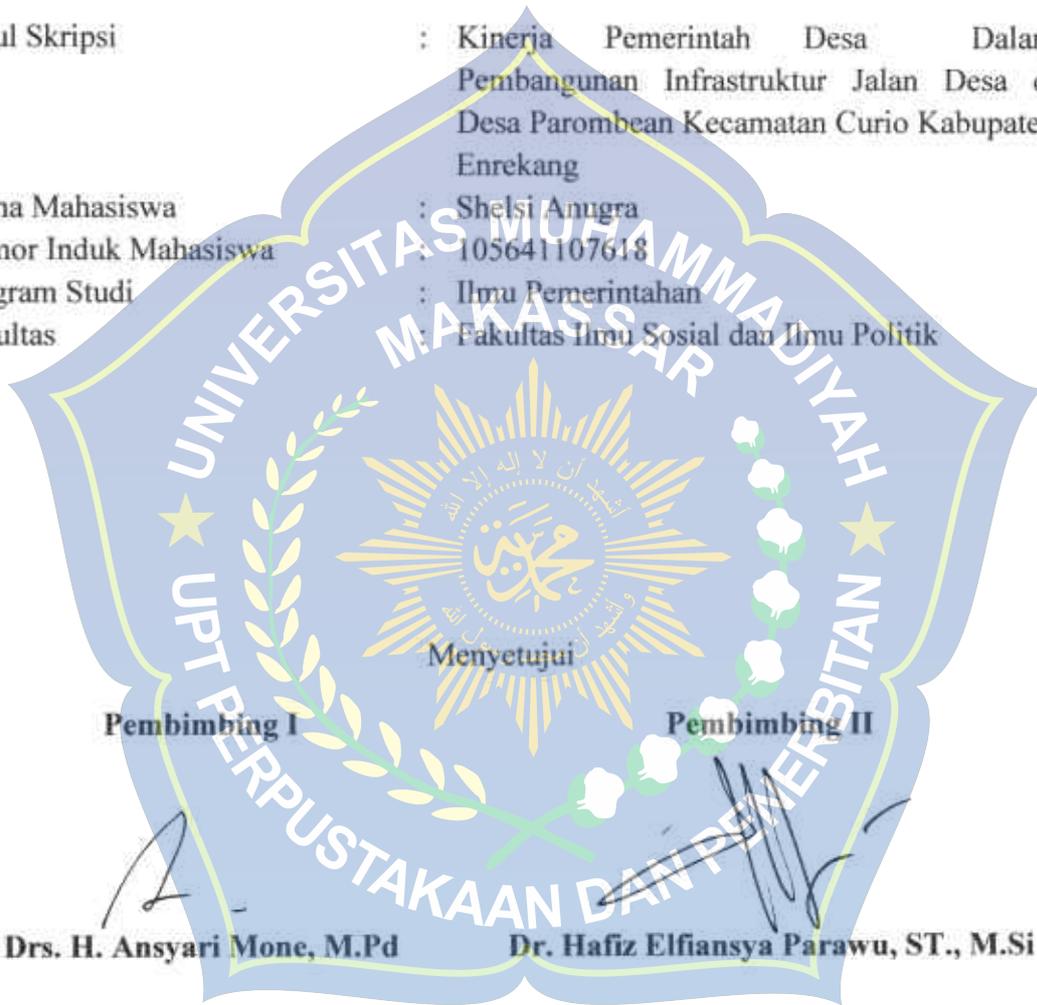
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Desa Dalam  
Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di  
Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten  
Enrekang  
Nama Mahasiswa : Shelsi Anugra  
Nomor Induk Mahasiswa : 105641107618  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

  
Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, ST., M.Si

Mengetahui



Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727

Ketua Program Studi

  
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM. 1207 163

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 074/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa 30 Agustus 2022.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730727

A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM. 9932797

Penguji

1. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (Ketua)

(  )

2. Dr. Abdi M.Pd

(  )

3. A. Luhur Prianto, S.IP.,M.Si

(  )

4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP.,M.Si

(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shelsi Anugra

Nomor Stanbuk Mahasiswa : 105641107618

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2022

Yang mengetahui,

  
Shelsi Anugra

## ABSTRAK

**SHELSI ANUGRA, 2022, Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Curio Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Hafiz Elfiansyah Parawu)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan dokumentasi. Informan kunci meliputi Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, dan tiga orang dari masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik dan dalam penyelesaiannya tidak efisien dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaan dikarenakan beberapa faktor, berdasarkan dengan indikator-indikator: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu sebaiknya pemerintah desa lebih memahami apa kebutuhan dari masyarakat sehingga roda pemerintahan dalam pembangunan bisa berjalan dengan optimal.

**Kata kunci :** Kinerja, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan baik ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan suatu nikmat yang tiada ternilai dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Saprudin dan ibunda St. Maryam yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan juga saudaraku Nur Iqfatul Citra, Astri Wulan, dan Puput Amelia tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat sehingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah

mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hafiz Eliansyah Parawu, M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Pemerintah Desa Parombean dan juga masyarakat yang baik hati dan telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.

9. Seluruh saudara angkatan Demokrasi 2018 dan terkhususnya kepada teman kelas Ilmu Pemerintahan B 2018 yang telah banyak membantu dan kebersamai selama menjalani perkuliahan sehingga penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman KKP angkatan XXIII Posko Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, terima kasih atas dukungan morilnya terhadap penulis.
11. Terima kasih kepada SONG KANG menemani kehaluan saya dikala lelah dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berkenan memberikan bantuan, mempengaruhi dan mendekonstruksi pemikiran penulis, sekaligus merupakan sosok yang menjadi idola dan inspirasi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak ada muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 30 Agustus 2022

Shelsi Anugra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN TUTUP</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>PENERIMAAN TIM</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Teori dan Konsep .....	12
1. Konsep Kinerja .....	12
2. Konsep Pemerintah Desa (PEMDES) .....	19
3. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	21
C. Kerangka fikir .....	28
D. Fokus Penelitian .....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis dan Tipe penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informan penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Teknik Pengabsahan Data .....	35

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang .....	37
B. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan Di Desa Parombean Kecamatan Curio .....	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahul.....	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa parombean 2022.....	39
Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi kegiatan SAPRAS Desa Parombean T.A 2022.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Curio.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Parombean.....	40



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Pusat mengharapkan suatu daerah itu dapat mengatur keperluan di daerah melalui otonomi daerah, baik urusan pemerintah kabupaten/kota maupun urusan pemerintah desa agar penyelesaian segala permasalahan yang ada di daerah bisa dengan cepat diatasi oleh pemerintah daerah. Pada prakteknya ternyata Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini tidak secara jelas membahas tentang apa saja perangkat pemerintah yang ada di desa, sehingga dirancang lagi sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara prinsip peraturan ini memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, aparatur desa, perencanaan desa, dan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 26 dikatakan bahwa kepala Desa mempunyai tugas penyelenggara urusan pemerintah, pemangunan, dan kemasyarakatan. Jelas dikatakan dalam hal ini yaitu kepala desa memiliki tugas dan kewajiban tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintah tetapi juga dalam pembangunan.

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting yaitu kemampuan dan minat kerja seseorang pekerja, penerimaan dan penjelasan, delegasi dan tugas dan peran serta tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi tingkat ketiga faktor tersebut, maka semakin besarlah kinerja karyawan. (dalam Gultom, 2014)

Selain itu, Kinerja juga memiliki arti lain yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi atau perusahaan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi, secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (dalam Jufrizen, 2018). Dapat dikatakan semakin baik kinerja karyawan di perusahaan tersebut maka semakin mudah perusahaan mencapai tujuannya, dan sebaliknya apabila kinerja karyawan itu rendah maka semakin sukar perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, sangat diperlukan sumber daya aparatur yang professional, teladan, disiplin, serta mampu menempatkan dirinya sebagai abdi masyarakat yang mampu menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan UUD 1945 (Endah, 2015).

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyelenggaraann

pelayanan public, paratur pemerintahan bertanggung jawab unruk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, masyarakat (dalam Indriani dkk , 2017).

Peranan kinerja makin dibutuhkan dalam era gloalisasi yang amat menekan prinsip persaingan bebas. Secara politis, peranan kinerja yang optimal yaitu dengan memelihara stabilitas Negara, hak dalam pemenuhan keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Suatu kinerja dapat dikatakan baik apabila telah mencapai suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

Infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangkah pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan guna untuk menunjang kebutuhan masyarakat salah satunya pembangunan jalan.

Pembangunan infrastruktur wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, untuk memberdayakan masyarakat serta upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pentingnya peranan pemerintah dalam pembangunan karena adanya keterbatasan masyarakat dalam berbagai bidang. Sedangkan pemerintah harus berfungsi

sebagai penegak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maupun dalam pengembangan berbagai tujuan pembangunan dan pemerintahan.

Terjadinya ketidak merataan suatu pembangunan desa itu bisa berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas warga masyarakat tersebut, dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan desa. sehingga bukan hanya tugas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi seperti apa solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyeleksi proyek-proyek pembangunan di suatu desa.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansiinstansi vertikal di daerah, maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya, atau oleh lembaga-

lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang meliputi pendekatan top-down dan bottom up, nampaknya akan menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur pada desa. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, ada sebagian besar proposal proyek pembangunan yang diajukan malah melewati berbagai kendala-kendala dari permainan birokrat yang ada di daerah.

Keberhasilan suatu wilayah itu dilihat dari bagaimana pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pembangunan infrastruktur di desa tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kota, desa dan kota memiliki potensi yang berbeda sehingga dengan memadukan keduanya sehingga diperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dalam arti bahwa pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.

Desa Parombean merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten tanah Toraja. Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang di bagi menjadi 8 wilayah Dusun

pada tahun 2015. Pembagian ini didasarkan kepada wilayah dan penyebaran penduduk. wilayah dusun diajukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh kepala desa.

Kecamatan Curio adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang yang pembangunannya masih bisa dikatakan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya, terutama dalam persoalan infrastruktur jalan salah satunya di Desa Parombean ini. Pembangunan terhadap infrastruktur desa terkadang terjadi masalah yang muncul dalam pelaksanaan proses pengelolaan pembangunan infrastruktur desa yaitu kondisi desa yang belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan pemerintah pusat dan daerah.

Perubahan kondisi fisik di desa lambat dilakukan karena desa terletak agak jauh dari pertumbuhan kota, keterbatasan anggaran pemerintah desa untuk melakukan proses pembangunan fasilitas tertentu membuat desa tidak dapat berbuat banyak melakukan pembangunan infrastruktur desa karena jumlah anggaran dana desa yang paling menentukan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibangun terlebih lagi di Desa Parombean juga pernah terjadi Tanah longsor yang mengakibatkan enam dusun terisolir. Akibatnya akses penghubung utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat menjadi susah dilalui. Kabupaten Enrekang memang sangat beresiko jika terjadi bencana tanah longsor. Hal tersebut dikarenakan letak Geografisnya sangat rentan terjadi bencana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil penelitian dengan judul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?

## C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian yaitu Untuk Mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## D. Manfaat penelitian

Dilakukan penelitian ini tentunya akan memberi manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Ada dua kegunaan penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini, dapat memberikan sumbangsi bagi pengembangan dan penyempurna teori-teori di dalam ilmu pengetahuan terkait dengan peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur jalan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi

acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan Peran Pemerintah Desa  
Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Parombean Kecamatan Curio  
Kabupaten Enrekang



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dan dasar dalam melakukan penelitian, meskipun variable dan objeknya bervariasi, tetapi bisa tetap menjadi referensi.

Meskipun beberapa variabel yang ada dalam penelitian sebelumnya beragam, akan tetapi setiap penelitian yang menjadi referensi memiliki variabel berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Mario Andra Novico (2020). Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Gedeng Kecamatan Mersam kabupaten Batang Hari	Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Gedeng Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Dilakukan dengan tahap (1) pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Gedeng Kecamatan Mersem Kabupaten Batang Hari dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dimana pemerintah desa mangajak seluruh masyarakat desa untuk bergotong-royong memindahkan material di tepi sungai menuju tempat

			<p>pembangunan desa agar dapat terselesaikan, pelaksanaan pembangunan, dimana pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat pada awal tahun sesuai dengan anggaran yang telah diperoleh baik dari ADD mengevaluasi dan menerapkan disiplin kerja dimana dengan mengawasi dan mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dengan menerapkan disiplin kerja. (2) kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di desa rantau Gedang kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari diantaranya: melakukan musyawara desa dimana pemerintah desa mengajak seluruh lapisan masyarakat tingkat RT, Rw, Tokoh agama, Tokoh Adat dan juga seluruh perangkat desa memutuskan perencanaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan, mengupayakan keerbukaan anggaran.</p>
2.	<p>MHD. Aris Munandar (2021). Kinerja Pemerintah Desa dalam apenyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Pemerintah Desa Sekeladi dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPedes) selama ini belum terlaksanan secara optimal, hal itu disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antar Lembaga Pemerintah desa, masih kurang optimalnya kinerja</p>

			Pemerintah Sekeladi, serta kurangnya tanggapan dari Pemerintah Desa Sekeladi dalam mendengarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat.
3.	Ofin Niwi Lingawe (2018) Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Kiliarma Agimuga Mimika Provinsi Papua	Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Provinsi Papua masih terkategori rendah sampai sedang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan

Sumber: Data dikelola oleh Peneliti 2022

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mario Andra Novico, MHD. Aris Munandar, Ofin Niwi Lingawe terdapat persamaan dan perbedaan peneliti:

1. Persamaan penelitian peneliti dengan peneliti Mario andar Novico (2020), yaitu sama-sama membahas tentang kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan perbedaannya yaitu waktu dan lokasi penelitian.
2. Persamaan penelitian peneliti dengan MHD. Aris Munandar (2021), yaitu sama-sama membahas tentang pembangunan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian MHD. Aris Munandar lebih terfokus kepada penyusunan rencana kerja sedangkan peneliti lebih terpokus kepada pembangunanya.
3. Persamaan penelitian peneliti dengan peneliti Ofin Niwi Lingawe (2018) yaitu sama-sama membahas tentang kinerja, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian

peneliti lebih terfokus kepada kinerja dalam pembangunan sedangkan penelitian Ofin Niwi Lingawe lebih fokus kepada Pelayanan publik.

## **B. Konsep Dan Teori**

### **1. Konsep Kinerja**

#### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja menurut Permadi (dalam Sumiati & Riska, 2021) adalah kontribusi bersama antara pekerja dan organisasi, organisasi harus menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan pegawai harus mempunyai disiplin kerja yang sesuai dengan job performance yang telah ditetapkan perusahaan.

Selanjutnya, Suwondo dan Sutanto (Sumiati & Riska, 2021) mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil dari kerja pegawai itu sendiri yaitu sebuah proses manajemen atau organisasi yang hasil kerjanya secara keseluruhan dapat dibuktikan secara konkrit dan dapat diukur.

#### **b. Indikator-Indikator kinerja**

Agus Dwiyanto (2008) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:

##### **a. Produktivitas**

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.

b. Kualitas Layanan

kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

c. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisist. Oleh sebab itu, responsibility bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

d. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan it dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. (Mailantang dkk., 2018)

Adapun Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Lenile (dalam (Junianto et al., 2020) mengemukakan beberapa indikator kinerja yang efektif, sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu kerja. Pegawai harus datang dan pulang kerja sesuai dengan aturan dan tetap bekerja di tempat kerja selama jam kerja secara teratur dan benar.
- b. Kepatuhan terhadap aturan kerja. Peraturan dan sistem kerja yang dibuat menjadi pedoman kerja yang harus dipatuhi secara baik dan benar.

- c. Kuantitas dan kualitas kerja yang memuaskan. Pekerjaan yang dilakukan harus memenuhi kuantitas dan kualitas yang tinggi, sehingga memuaskan bagi organisasi bersangkutan.
- d. Penyelesaian pekerjaan dan semangat kerja yang baik. Kinerja tidak hanya menyangkut ketaatan seorang pegawai kepada organisasi, tetapi juga menyangkut semangat dan kegairahan kerja. Setiap pegawai idealnya harus dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, bukan keterpaksaan atau takut dikenakan sanksi.
- e. Hubungan dan komunikasi yang efektif. Kinerja yang baik tidak akan muncul tanpa ada hubungan dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf.
- f. Mampu memberi kontribusi dan nilai tambah. Kinerja yang baik akan menjadi motivasi dalam bekerja dan dihargai sebagai suatu nilai tambah bagi seorang pegawai.
- g. Tanggung jawab terhadap asset organisasi. Asset organisasi sebagai sarana dan prasarana pendukung kerja haruslah dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pegawai yang memiliki kinerja yang baik akan selalu bertanggung jawab dengan baik pada setiap penggunaan atau memanfaatkan asset organisasi.

Selanjutnya yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno, (2014) yaitu kinerja pada umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil dan standar kerja yang ditetapkan. Adapun indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

a) Hasil Kerja

Tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.

b) Pengetahuan Pekerjaan

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari hasil kerja.

c) Inisiatif

Tingkat inisiatif selama melakukan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang timbul.

d) Kecekatan mental

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima intruksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta kerja yang ada.

e) Sikap

Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

f) Disiplin waktu dan absensi

Tingkat ketetapan waktu dan tingkat kehadiran atau absensi.

Menurut Agus Dharma (2003) ( dalam Meiningsih, 2016) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja sebagai berikut:

a) Kualitas

Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan (tepat atau tindakannya).

Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran tingkat

kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.

b) Ketetapan waktu

Ketetapan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang ditentukan. Pengukuran ketetapan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kualitatif.

c. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja

Menurut Bernardin & Russel, 2010 (dalam Anjani, 2019) terdapat lima indikator yang dapat memengaruhi kinerja diantaranya yaitu:

a) Kualitas (*Quality*)

Kualitas adalah tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktifitas maupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas.

b) Kuantitas (*Quantity*)

Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang diselesaikan.

c) Ketepatan waktu (*Timeliness*)

Ketepatan waktu adalah tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain.

d) Efektifitas Biaya (*Cost Effectiveness*)

Efektivitas adalah tingkat penggunaan sumber daya manusia, organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

e) Hubungan antar perseorangan (*Interpersonal Impact*)

Merupakan tingkatan dimana seseorang karyawan mampu untuk mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerjasama antar karyawan yang lain dan juga bawahannya.

**d. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi penetapan pencapaian indikator kinerja (dalam Watkaat, 2020)

Pengukuran kinerja (*performace Maesurenment*) ialah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, sehingga dapat dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (dalam Watkaat, 2020)

Selain itu, Pengukuran kinerja adalah hal yang penting dalam manajemen program serta keseluruhan, karena kinerja yang dapat di ukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan unpan balik (*feedback*) yang

penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan di masa yang akan datang (dalam Watkaat, 2020).

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan yang terpenuhi
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan.
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitoring tingkat kinerja.
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan prioritas apa yang diperhatikan.
5. Menghindari konsekuensi dan rendahnya kualitas
6. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

## **2. Konsep Pemerintah Desa (PEMDES)**

### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). (Rosalina, 2013)

Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

#### **b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Mengingat perangkat desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah nasional, maka pembahasan tanggung jawab pemerintah desa tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah pusat yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tanggung jawab utama kepala desa adalah;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintah desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembangunan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa
5. Pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum

Berdasarkan tanggung jawab dan fungsi pemerintahan, berarti pemerintah tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, walaupun lebih sempit cakupannya, juga menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada waktu yang bersamaan. Unit pemerintah desa dan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan tingkat terendah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi manajemen operasi atau pengembangan

### 3. Fungsi manajemen atau registrasi

Fungsi administrasi seluruh desa dan pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan secara normal jika tidak ada dukungan kelembangaan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing lembaga semaksimal mungkin. Menyadari pentingnya akan tugas administrasi pemerintah desa, kepala desa dan kader harus berupaya mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintah, pembangunan, dan sosial.

### 3. Konsep Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Menurut Kodoatie, R.J (Jegiftha et al., 2018) mengatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002) menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan

berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Secara umum, infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan structural di di bawah satu.

Infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori diantaranya sebagai berikut:

1. Obyek Rahasia seperti gedung pusat pemerintahan, Gedung pusat keamanan (polisi).
2. Obyek Vital seperti pusat dan jaringan listrik, pusat dan jaringan komunikasi, perdagangan, sarana dan prasarana transportasi, serta Sembilan bahan pokok.
3. Obyek Umum seperti bangunan pendidikan, peribadatan dll.

Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sembangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya dalam peningkatan kualitas hidup. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat dilihat dari terciptanya kenyamanan dalam lingkungan fisik, meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya nilai konsumsi, meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta meningkatnya kemakmuran yang nyata.

### **a. Pengertian Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan merupakan suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Dengan Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar lainnya, kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsisir harga-harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung-kampung).

### **b. Tujuan dan Fungsi Infrastruktur Jalan**

Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan. Selain itu, jalan bertujuan untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran, dan kawasan perumahan dan pemukiman serta daerah pinggiran. Jalan juga bertujuan untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan

mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota serta kaitan dengan daerah belakangnya.

Pada dasarnya dengan adanya pembangunan daerah dan perkotaan, jalan memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, jalan memiliki fungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar arus barang dan jasa antara pusat-pusat produksi dan daerah pemasaran atau sebaliknya. Sedangkan di sisi lain, jalan berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena jalan dapat mengurangi isolasi kegiatan sosial ekonomi pada daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh karena itu, pembangunan jalan merupakan landasan pokok pembangunan suatu daerah.

Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu wilayah. Tujuan dan fungsi tersebut, antara lain :

- a. Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang disebut sebagai fungsi akses darat. Fungsi ini sangat penting untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.
- b. Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat (*community servicefunction*). Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa-jasanya dalam proses pendistribusian produk, pemasaran ataupun kegiatankegiatan masyarakat dan ekonomi lainnya.
- c. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh dan antar kota atau wilayah, yang berfungsi sebagai

perkumpulan komunitas dan transportasi jarak jauh. Fungsi jalan ini penting bagi wilayah Negarayang luas karena semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan jalan jauh.

Klasifikasi Jalan Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2004 mengenai jalan maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan, yaitu: Klasifikasi jalan menurut peran dan fungsi, klasifikasi jalan menurut wewenan, klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu.

#### a. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsinya

Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsinya, terdiri dari:

1). Jalan Arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama, dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jika ditinjau dari peranannya persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah: Kecepatan rencana  $> 60$  km/jm, lebar badan jalan  $> 8,0$  meter, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai, tidak boleh terganggu oleh kegiatan local, jalan arteri tidak terputus walaupun memasuki kota.

2). Jalan kolektif, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektif adalah: Kecepatan

rencana  $> 40$  km/jam, lebar badan jalan  $> 7,0$  meter, kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, jalan kolektor tidak terputus walaupun memasuki daerah kota.

3). Jalan Lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal adalah: Jalan lokal tidak terputus walaupun memasuki desa, lebar badan jalan  $> 6,0$  meter, kecepatan rencana  $> 20$  km/jam. 4). Jalan Lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

#### b. Klasifikasi Jalan Menurut Wewenang

Tujuan pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Klasifikasi jalan menurut wewenang terdiri dari:

1). Jalan Negara, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan jalan strategis Negara serta jalan tol.

2). Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antara ibukota kabupaten/kota dengan jalan strategis provinsi.

3). Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

4). Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman didalam desa serta jalan lingkungan.

#### c. Klasifikasi Jalan Menurut Muatan Sumbu

1). Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini belum digunakan di Indonesia, namun sudah dikembangkan diberbagai Negara maju seperti Prancis telah mencapai sumbu muatan sebesar 13 ton.

2). Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu seberat 10 ton, jalan kelas ini sesuai untuk angkutan peti kemas.

3). Jalan Kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

4). Jalan Kelas IIIB, yaitu jalankolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

5). Jalan Kelas IIIC, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,173 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Menurut penelitian Ikhsan dalam Sri Yara Arafah menyatakan bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu infrastruktur pengangkutan berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan turut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa.

### **C. Kerangka Pikir**

Adapun kerangka pemikiran tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang mengacu pada teori Agus Dwiyanto (2008) mengenai atribut kinerja yang meliputi Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berikut merupakan kerangka pikir yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini berpijak dari rumusan masalah adalah Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

#### E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerjanya tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat didalam pembangunan Infrastruktur jalan Desa Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
2. Kualitas layanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kualitas layanan dilihat tingkat kepuasan dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Parombean kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
3. Responsibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan daya tanggap pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa apakah sesuai dengan rencana kerja atau prioritas utama yang telah disusun di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
5. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan laporan pertanggung jawaban dari Pemerintah Desa atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kurang lebih dua bulan antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Adapun alasan memilih lokasi penelitian dikarenakan lokasi penelitian merupakan paling efektif untuk mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.

#### B. Jenis dan tipe Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Metode kualitatif yang mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau karena ukuran-ukuran lain bersifat walaupun bahan-bahan-tersebut secara nyata ada dalam masyarakat. Afrizal (2014) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia secara peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif, yaitu penelitian menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti, dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dan dokumentasi mengenai

## Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Berikut pengertian dari kedua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara ataupun hasil dari apa yang terjadi di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang kedua atau telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### D. Informan penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penelitian informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purpositive sampling*, yang artinya teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai informan).

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria yang dipilih dan relevan, dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Abdurrahman Zaid R. S.Kom	Kepala Desa Parombean
2.	Muhammad Ilham	Kaur Perencanaan
3.	Ardin	Ketua BPD
4.	Sabura	Masyarakat
5.	Muh. Jamal	Masyarakat
6.	Suleman	Masyarakat

Sumber: Data ditentukan/diolah oleh peneliti

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan yang ingin diteliti yang berupa fakta. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi objek sehingga mendapatkan gambaran mengenai objek yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi (Sugiyono, 2011). Penelitian

dilakukan oleh peneliti untuk mencari data kepada orang (informan) yang dipilih secara langsung sehingga dapat memberikan sebuah informasi. Teknik yang digunakan dalam Wawancara yaitu dengan menggunakan Pedoman Panduan Wawancara dan juga Rekaman.

### 3. Dokumentasi

menurut Sugiyono (2015) Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan, maka pengambilan gambar dan rekaman digunakan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Perombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah-Langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari lapangan. Hal yang penting difokuskan serta diberi susunan yang sistematis sehingga lebih memudahkan. Data yang direduksi adalah data hasil observasi dan wawancara yang mendukung tema yang dikaji.

## 2. Display Data

Display Data adalah penyajian data atau informasi berdasarkan apa yang data dilihat dan apa yang diperoleh selama dalam observasi, baik itu dalam bentuk skema maupun table yang bertujuan agar data yang diperoleh menggambarkan keseluruhan sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Data yang terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya diberi kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara data terkumpul lalu dianalisis secara keseluruhan dan ditinjau dari konsep-konsep yang berhubungan.

## G. Teknik keabsahan Data

Pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, didiskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang beda, dan mana spesifik dari 3 sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dan ketiga sumber data tersebut.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

## 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

## 1. Kondisi Geografis

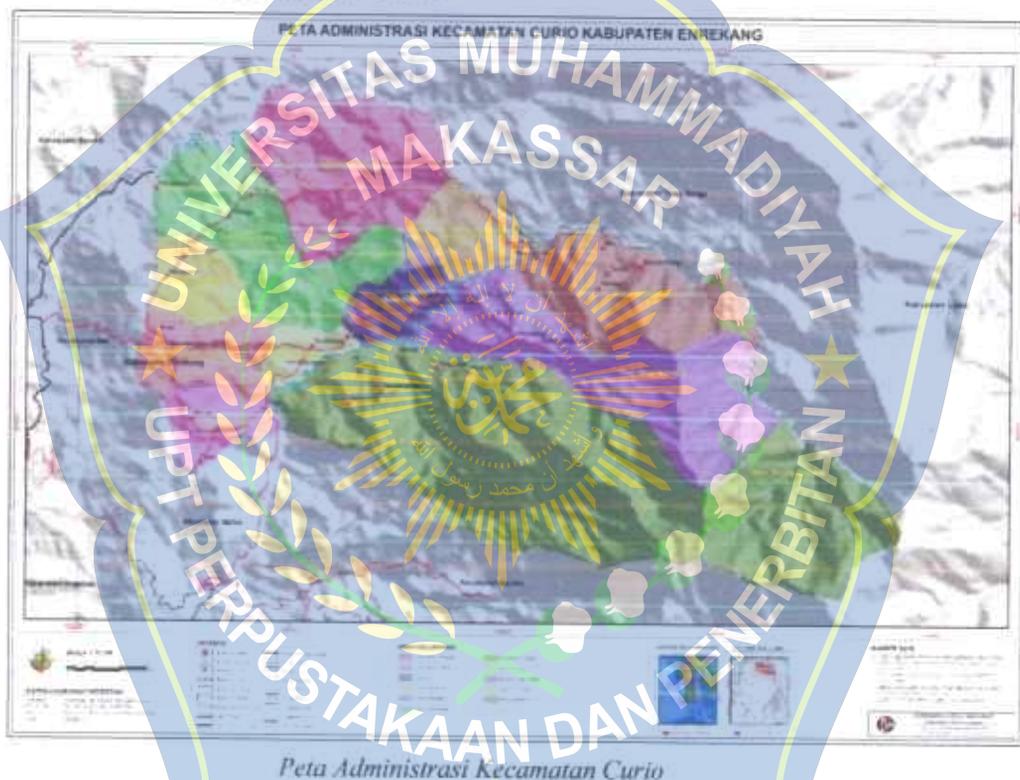
Secara geografis, Desa Parombean berada pada wilayah kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Luas wilayah Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah 25,08 km<sup>2</sup>, Berada ketinggian 570m diatas permukaan laut, titik koordinat bujur 119,984397 dan titik koordinat Lintang 3.314365. Kode Desa/kelurahan 7316982004. Desa Parombean menjadi pembatas antara Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Itulah sebabnya, bahasa dan perilaku kehidupan masyarakatnya memiliki kesamaan dengan Toraja pinggiran. Desa Parombean terdiri dari 8 dusun diantaranya yaitu Dusun Batu Piak, Liba, bau, To'collo, Bt Limbong, Le'tobara, Sarang, dan Bunga Mendoc. Untuk menuju ke Desa Parombean, dibutuhkan waktu tempuh sekitas 1 jam 30 menit dari jalan poros Enrekang-Toraja.

Adapun batas-batas wilayah Desa Parombean Kecamatan Curio kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Uluwai Barat (Kab. Tanah Toraja )
- 2) Sebelah Timur : Desa Uluwai Timur (Kab. Tanah Toraja)
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sanglepongan (Kab. Enrekang)
- 4) Sebelah Barat : Desa Curio (Kab. Enrekang)

Keadaan Iklim di Desa Parombean terdiri dari musim hujan, kemarau, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari-April, musim kemarau biasanya terjadi antara Bulan Juli-November, dan Musim Pancaroba biasanya terjadi pada bulan Mei-juni.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Curio



## 2. Keadaan Demografi

Di setiap daerah disuatu wilayah masing-masing memiliki karakteristik agraris yang berbeda, salah satunya adalah Desa parombean. Desa parombean merupakan Desa yang berada pada wilayah pegunungan Enrekang yang memiliki iklim dingin sehingga pertumbuhan tanaman Hortikultural seperti tanaman, cengkeh, merica, coklat, tanaman palawija tumbuh subur. Sedangkan pada

peternakan sebagian besar masyarakat berternak Sapi, kerbau, ayam kampung, dan juga kambing. Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang terdiri dari 8 Dusun. Berikut

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Parombean 2022

NO.	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	Batu Piak	106	117	223
2.	Liba	139	117	256
3.	Bau	97	85	182
4.	To'collo	109	108	217
5.	Buntu Limbong	127	116	234
6.	Le'tobara	144	136	280
7.	Sarang	90	63	153
8.	Bunga Mendoe	96	93	189
<b>JUMLAH</b>		<b>908</b>	<b>835</b>	<b>1743</b>

Sumber: Data Sekunder Kantor Desa Parombean 2022

### 3. Struktur Organisasi Desa Parombean

Gambar 4.2 Struktur organisasi pemerintah desa parombean



Sumber: Data Sekunder kantor Desa Parombean 2022

#### 4. Kondisi Sosial Desa Parombean

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan terbukti bahwa sudah banyaknya pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi bahkan sudah ada yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah dikalangan anak usia sekolah khususnya di jenjang perguruan tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Parombean.

#### 5. Gambaran infrastruktur

Terdapat sarana dan prasarana berupa jalan raya (jalan beton) yaitu poros yang menghubungkan Desa Parombean dengan Desa Curio dan Desa Parombean Dengan Tanah Toraja.

Sarana dan Prasarana sosial yang ada yaitu Talud, Dekker, Jembatan, Dreinasi dan juga jalan tani. sarana pendidikan sekolah TK 1 unit SD 2 unit, MTST 1 unit, Masjid 8 unit, Pustu 2 dan Rumah Malagata 1 unit.

#### 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Parombean

##### 1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina ekonomi desa.
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Mwlaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas Badan Perwakilan Desa (BPD) antara lain yaitu:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)

- a. Meminta keterangan kepada kepala desa.
- b. Menyatakan pendapat kewajiban.
- c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- e. Mempertahankan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- f. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Memproses pemilihan kepala desa.
- h. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan.

### 3. Sekretaris Desa

Tugas pokok sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi Sekretaris Desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
  - b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan melaksanakan tugas dan apabila kepala desa dberhentikan sementara.
  - c. Menyiapkan bantuan penyusunan peraturan desa.
  - d. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
  - e. Pengkordiansian penyelenggaraan tugas-tugas urusan dan,
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
4. Bendahara/kaur keuangan

Tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi Bendahara/Kaur Keuangan yaitu:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan desa.
  - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa.
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5. Kaur pemerintahan

Tugas pokok membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi Kaur Pemerintahan yaitu:

- a. Pelaksanaan administrasi kependudukan.
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaraan penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil.

#### 6. Kaur Pembangunan

Tugas pokok kaur pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembangunan.

Fungsi Kaur pembangunan yaitu:

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perlembagaan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
- c. Pengelolaan tugas pembantuan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### 7. Kaur Umum

Tugas kaur umum yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi Kaur Umum yaitu:

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- b. Pelaksanaan pencatatan investarisasi kekayaan desa.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e. Pengelolaan administrasi perangkat desa.
- f. Persiapan bahan-nahan laporan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

#### 7. Kelapa Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun yaitu:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.

- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan penerapan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi Kepala Dusun yaitu:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **B. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio.**

Penyelenggaran pemerintah desa lebih ditunjuk dalam meningkatkan kinerja pembangunan disetiap bidangnya. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja dalam pembangunan adalah dengan cara

pengawasan. Dengan melihat kinerja dari aparat pemerintah desa adalah untuk melihat apakah aktivitas oleh aparat pemerintah desa bekerja sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Olehnya itu maka penilaian kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Desa parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dinilai dengan menggunakan 5 indikator diantaranya yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Adapun hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

#### I. Produktivitas

Produktivitas adalah ukuran yang diberikan dalam menyatakan sejauh mana dari tingkat keberhasilan dari sebuah proses pencapaian dengan memanfaatkan segala berbagai sumber secara optimal. Adapun hal yang penting dalam meningkatkan produktivitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu dengan menggunakan indikator Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa yang mengatakan bahwa;

“Kalau kita berbicara masalah hemat atau efisien dari segi penggunaan tenaga pelaksanaannya saya rasa tidak hemat karna kegiatan pembangunannya itu melibatkan ke masyarakat. Termasuk tenaga kerjanya apa semua kan itu sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa harus kita menggunakan tenaga masyarakat. Kalau dari segi hemat penggunaan biaya atau anggarannya saya kira mungkin tidak ada

perubahan dari kondisi sebelumnya. Termasuk dari segi biaya bahan-bahan yang kita gunakan di desa karena hampir 100% bahannya kita ambil dari luar. Nah yang membuat kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di desa itu saya kira juga tidak hemat dari segi biaya karna biaya transpor bahan masuk di desa karna jauhnya kita maka itu yang menyebabkan tidak hemat biaya. Kalau dari segi waktu pelaksanaannya saya kita tergantung juga dari segi kondisi, kalau misalkan kondisi cuaca bagus ya jelas terkadang cepat selesai dari jadwal yang kita tentukan. Tapi kalau misalkan kondisi cuacanya tidak bagus misalkan tinggi curah hujan ya mau tidak mau terkadang melebihi dari waktu yang sudah ditentukan". (wawancara dengan Abdurrahman Zaid R, S.Kom pada tanggal 4 juli 2022).

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan selaku Kaur Perencanaan yang mengatakan bahwa;

"untuk perihal efisien dari segi tenaga pelaksanaan, kami selaku pemerintah desa kami prioritaskan masyarakat yang mempunyai keahlian dalam pembangunan, kalau berbicara masalah efisien dari segi penggunaan biaya saya rasa tidak hemat karna akses mobilitas bahan lumayan jauh. Jadi kami mengunjungi beberapa toko material siapa yang memberikan harga yang murah tetapi berkualitas maka itu yang menjadi penyedia bahan dan alat pembangunan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, sedangkan dari segi efisien waktu pelaksana saya rasa itu tergantung dari cuaca dan kondisi saja". (wawancara dengan Muhammad Ilham, pada tanggal 4 juli 2022).

Hasil dari wawancara dengan Informan dapat disimpulkan bahwa dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaannya belum bisa dikatakan hemat karna kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai masyarakat dalam bekerja. Sedangkan dari segi hemat waktu pelaksanaannya belum juga dikatakan hemat karna dalam pelaksanaannya berpatokan kepada cuaca. Dan dari segi hemat penggunaan biaya atau anggaran pelaksanaannya dikatakan tidak hemat biaya karna tranpor biaya bahan masuk ke desa mahal dikarenakan akses ke desa jauh.

PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PMBD) T.A 2021 DESA PAROMBAN KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG							
RENAPITULASI REALISASI KEGIATAN SARPRAS							
NO	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA	REALISASI	PROGRES FISIK	TANGGAL	KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN dan VOLUME	(%)	MONITORING	
1	Perataan Lahan Pembangunan Posyandu Nural Huda Lifa	Dusun Lifa	10 ME	M2	0,00	16 November 2021	
2	Rabat Beton Jalan Dusun Lifa Baru (118 x 3 x 0,15 m)	Dusun Lifa Baru	118	Meter	0,00	16 November 2021	Tahap II
3	Rabat Beton Jalan Dusun Buanga Membre (150 x 3 x 0,15 m)	Dusun Buanga Membre	150	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap II
4	Rabat Beton Jalan Dusun Lifa (135 x 0,80,15 m)	Dusun Lifa	135	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap II
5	Rabat Beton Jalan Pasir Desa (60 x 3,00,15 m)	Dusun Toceollo	60	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap I
6	Rabat Beton Jalan Dusun Buanga Lambong (150 x 3 x 0,15 m)	Dusun Buanga Lambong	150	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap II
7	Pengerasan Jalan Janti Batu Paak (550 x 3 x 0,15 m)	Dusun Batu Paak	550	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap II
8	Tabel Jalan Lintang Dusun Lifa	Dusun Lifa	36	Meter	100,00	16 November 2021	Tahap I

9	Pembangunan Jembatan Kurungan Ds To'Collo 4,3 x 2,5 meter	Dusun To'collo	1	Paket		0,00		
10	Pembangunan Plat Dekker Dusun Sarang 5 x 1,4 x 0,9 m	Dusun Sarang	1	Paket		100,00	16 November 2021	Tabap II
11	Pembangunan Plat Dekker Dusun Buru Lumbong 1,45 x 7 x 0,6 m	Dusun Buru Lumbong	1	Paket		100,00	16 November 2021	Tabap II
12	Pembangunan Plat Dekker Jalan Tua Dusun Batu 1,1 x 0,8 x 1,3 m	Dusun Batu	1	Paket		100,00	16 November 2021	Tabap II
13	Plat Dekker Jalan Tua Dusun Batu to'bangin 1,1 x 0,8 x 1,3 m	Dusun Batu	1	Paket		100,00	16 November 2021	Tabap II
14	Drenase Dusun Batu Paak	Dusun Batu Paak	100	Meter		100,00	16 November 2021	Tabap II
15	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah Pemukiman Dusun Sarang 147 Meter	Dusun Sarang	147	Meter		100,00	16 November 2021	Tabap II
16	Pembangunan Plat Dekker Jalan Tua Dusun Batu Paak 1,2 x 4 x 1,3 m	Dusun Batu Paak	1	Paket		100,00	16 November 2021	Tabap II
17	Pembangunan WC RUM	Paromban	8	Unit		640,00	16 November 2021	Tabap III
18	Pembangunan SAM	Dusun Batu Paak	1	Paket		30,00		
19	Pembangunan Tajid dan Pemadati Taman Desa	Dusun Batu Paak	43	Meter		30,00	16 November 2021	Tabap II

Sumber: Data Sekunder Dari Kantor Desa Paromban

## 2. Kualitas Layanan

Pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Ketepatan cara pelayanan yang baik akan mampu menunjang keefektifan kinerja dari pihak yang memberikan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan bagi pihak yang menerima layanan. Dalam hal ini kualitas layanan dari pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang menggunakan indikator Kepuasan Masyarakat.

“Berbicara masalah puas akan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur saya rasa sudah puas dengan kinerjanya. Bisa kita lihat dengan kondisi jalan pada tahun-tahun sebelumnya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Tapi untuk sekarang ini jalan dari dusun ke dusun sudah mulai membaik” (wawancara kepada Sabura, tanggal 5 juli 2022).

Hal ini di pertegas oleh informan lainnya yaitu,

“saya mengakui kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa Di Desa parombean ini sudah mencapai kualitas pelayanan yang cukup baik hal ini bisa kita lihat akses dari dusun ke dusun sudah mulai membaik”. (wawancara kepada Suleman, pada tanggal 5 juli 2022)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua BPD berpendapat bahwa;

“kualitas yang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa saya rasa sudah berjalan dengan baik. Bukan hanya dari segi pembangunan yang diberikan tetapi kualitas layanan yang diberikan dikantor bisa dibilang baik dalam melayani”. (wawancara dengan Ardin, pada Tanggal 4 juli 2022)

Dari peneliti dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa parombean kecamatan curio kabupaten enrekang cukup baik sehingga membuat kinerja pemerintah desa berjalan dengan maksimal.



Sumber: Data Sekunder Dari Kantor Desa Parombean

### 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dalam Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memberi respon atau daya tanggap terhadap suatu program. Dan juga terkait dengan kemampuan dalam membuat agenda atau rencana kerja sesuai dengan prioritas.

“Dari kita selaku pemerintah dan itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita selaku pemerintah di desa, dalam bentuk daya tanggap kita itu kita melakukan kegiatan pembangunan termasuk infrastruktur berdasarkan skala prioritas dan juga secara regulasi karna itu sudah menjadi poin kewajiban kita selaku pemerintah desa ketika melaksanakan kegiatan harus berdasarkan dengan regulasi memang sudah diatur oleh pemerintah maka, dalam perencanaan pembangunan itu kita lakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada.” (wawancara dengan Abdurrahman zaid R. S.Ikom tanggal 4 juli 2022).

Hal ini dipertegas oleh informan yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku aparat pemerintah desa selalu merencanakan rencana pembangunan yang baik seiring dengan apa menjadi visi dari desa. Hubungan dari aparat pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat namun disetiap pembangunan yang ada kita memang harusnya mengikti setiap aturan-aturan atau sesuai dengan standar SOP yang berlaku.” (wawancara dengan Ardin, tanggal 4 juli 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa daya tanggap pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan skala prioritas dan secara regulasi karena dalam perencanaan pembangunan harus sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pemerintah desa.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang emplisit maupun implisist. Responsibilitas itu terkait bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah atau

pusat. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kaur Perencanaan Yang mengemukakan bahwa:

“kalau bicara standar inikan tidak terlepas dari bagaimana kualitas pembangunan itu sendiri, jadi untuk mempertahankan kualitas itu tetap kita mengacu kepada peraturan termasuk dalam perencanaannya memang kita melakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK perencanaan pembangunan.” (wawancara dengan Muhammad Ilham, tanggal 4 juli 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan selaku Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sudah cukup baik karena sudah berdasarkan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah di desa parombean kecamatan curio ini”. (wawancara dengan Ardin, pada tanggal 4 juli 2022)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Semua program kegiatan yang ada di desa harus berdasarkan mekanisme pelaksanaan yang telah dibuat. Mekanismenya tersebut menjadi dasar atau acuan kita dalam proses pembangunan. Maka tim pelaksana kegiatan membuat suatu mekanisme kerja yang akan dijalankan kedepannya berdasarkan rancangan pembangunan yang telah dibuat dan disepakati bersama” (wawancara dengan Abdurrahman Zaid R, pada tanggal 4 juli 2022)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat maupun daerah hal ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK perencanaan pembangunan. Kesesuaian program-program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh Pemenritah Desa dapat menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik

##### 5. Akuntanbilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas dalam suatu kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari bagaimana pertanggung jawabannya. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintahan. Dalam hal ini akuntabilitas diukur agar terciptanya Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

“Bicara tentang pertanggung jawaban itu sudah memang diatur oleh undang-undang bahwa prosedur termasuk pertanggungjawaban kita membuat pelaporan pertanggung jawaban dalam 3 tahap yaitu tahap I, II, dan III dan kita buat bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk informasi lewat media termasuk kita buat papan informasi di tempat-tempat strategis terkait dengan masalah apa yang kita lakukan apa yang menjadi kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban saya kira kendala dalam membuat laporan saya rasa bukan hanya desa parombean yang mengalami kesulitan karna dalam proses pembuatan laporan itu terlalu rumit, terlalu banyak embel-embelnya karna regulasi itu selalu berubah-ubah makanya kita sebagai pemerintah dalam hal membuat pelaporan mau tidak mau harus tetap belajar dan belajar untuk bagaimana kita buat laporan itu sesuai dengan aturan yang ada. Setiap kegiatan dibuatkan Lpj dengan melampirkan seperti Spp, Kwitasnsi, Nota pesanan, serta Dokumentasi kegiatan dan juga lampiran yang mendukung”. (wawancara Muhammad ilham , tanggal 4 juli 2022)

Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan selaku

Kepala Desa yang berpendapat bahwa:

“kami selaku pemerintah desa sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat yaitu dengan membuat papan informasi yang kita pasang dititik-titik lokasi yang strategis dengan dibuatnya seperti itu masyarakat bisa mengetahui rencana atau kegiatan apa yang kita lakukan. Dan kalau berbicara tentang pelaporan memang ada beberapa kendala yang dihadapi tapi kita melakukan pembuatan pelaporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa laporan pertanggung jawaban dapat dibuat dengan menggunakan papan informasi di tempat-tempat yang strategis. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban seperti laporan yang terlalu rumit dan terlalu banyak perubahan regulasi yang ada.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Adapun data dari hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Lebih dominan berupa kalimat-kalimat deskriptif yang merupakan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan sebagai sumber utama penelitian. Hasil wawancara yang direkam dan difoto menggunakan handphone, di samping data dari hasil wawancara peneliti juga mendapatkan data arsip dan profil dari Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Berikut pembahasan dari data dan hasil wawancara tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Perombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang:

#### **1. Produktivitas**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Produktivitas menurut Agus dwiyanto (2008) Produktivitas adalah dipahami sebagai rasio antara input dan output, dalam artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan dan didukung oleh observasi, maka dapat dianalisa bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur, bahwa Pemerintah Desa sudah menyelesaikan pembanguann infrastruktur jalan Desa sudah berjalan dengan baik, dan dalam penyelesaiannya tidak efisien dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaan dan segi penggunaan biaya disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi dan cuaca yang tidak menentu dan juga biaya transportasi dikarenakan akses menuju desa parombean yang jauh. Dan sudah dilakukan secara efektif pelaksanaan pelayanan, yaitu sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, dengan artian bahwa sudah optimal atau berjalan dengan baik.

## 2. Kualitas layanan

Kualitas layanan menurut Agus Dwiyanto (2008) adalah Pelayanan pada dasarnya merupakan aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Ketepatan cara pelayanan yang baik akan mampu menunjang keefektifan kinerja dari pihak yang memberikan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan bagi pihak yang menerima layanan. Yang menjadi indikator dari aspek kepuasan layanan yaitu kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Dari penelitian disimpulkan dari hasil ovservasi yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang cukup baik sehingga

membuat kinerja pemerintah desa berjalan dengan maksimal karena dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kondisi jalan sekarang ini sudah mulai membaik.

### 3. Responsivitas

Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2008) yaitu kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan public dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Yang dimaksud dalam Responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memberi respon atau daya tanggap terhadap suatu program. Dan juga terkait dengan kemampuan dalam membuat agenda atau rencana kerja sesuai dengan prioritas.

Dari hasil penelitian dan observasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan konsep Responsivitas Pemerintah Desa sudah melakukan pembangunan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak hanya itu pemerintah desa juga sudah baik menyikapi atas aspirasi masyarakatnya hanya saja tidak semua yang disampaikan masyarakat dapat terealisasikan dikarenakan pemerintah desa lebih memilih pembangunan mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu.

### 3. Responsibilitas

Responsibilitas menurut Agus Dwiyanto (2008) adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Dari hasil penelitian dan hasil observasi yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat maupun daerah hal ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK perencanaan pembangunan. Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai seperti apa yang diharapkan masyarakat.

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Agus Dwiyanto (2008) yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang dimaksud dalam pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu pembuatan laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Dari hasil penelitian dan observasi yang telah saya lakukan, bahwa Kinerja Pemerintah Desa dalam aspek Akuntabilitas sudah menyampaikan tepat pada waktunya. Dan dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa 2 kali membuat pelaporan, memang adanya kendala seperti regulasi terus

berubah-ubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produktivitas, Kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur, bahwa Pemerintah Desa sudah menyelesaikan pembanguann infrastruktur jalan sudah berjalan dengan baik, dan dalam penyelesaiannya tidak efisien dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaan dikarenakan beberapa faktor. Dan sudah dilakukan secara efektif pelaksanaan pelayanan, yaitu sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, dengan artian bahwa sudah optimal atau berjalan dengan baik.
2. Kualitas Layanan, kualitas layanan Pemerintah Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang cukup baik sehingga membuat Kinerja Pemeritah Desa berjalan dengan maksimal.
3. Responsivitas, sudah melakukan pembangunan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak hanya itu pemerintah desa juga sudah baik menyikapi atas aspirasi masyarakatnya hanya saja tidak semua yang disampaikan masyarakat dapat terealisasikan dikarenakan pemeritah desa lebih memilih pembangunan mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu.

4. **Responsibilitas**, Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah pusat maupun daerah hal ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam ALBESTEK perencanaan pembangunan. **Tanggungjawab** Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah sesuai seperti apa yang diharapkan masyarakat.
5. **Akuntabilitas**, Kinerja pemerintah Desa dalam aspek Akuntabilitas sudah menyampaikan tepat pada waktunya. Dan dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban memang adanya kendala, namun hal itu dapat diatasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa sudah berjalan dengan baik.

#### B. Saran

Adapun saran dari penulis dari hasil penelitian tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yaitu sebaiknya pemerintah desa lebih memahami apa kebutuhan dari masyarakat sehingga roda pemerintahan dalam pembangunan bisa berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 1–10.
- Endah, K. (2015). Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap kepuasan Masyarakat oleh UPTD Bina Margakecamatan Cijulang kabupaten pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Gultom, D. K. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi perusahaan Dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perusahaan gas negara (Persero) Tbk Medan. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14(02), 176–184.
- Indriani, D., Rusmiwari, S., & Suprojo, A. (2017). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat: Studi kasus Izin Produksi Pangan Industri Rumaah Tangga Di Kantor Badan Penanaman Modal Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2).
- Jegiftha, L., Gosal, R., & Sambiran, S. (2018). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Jufrizen. (2018). Peran motivasi kerja dalam memoderenisasi pengaruh Konfensasi dan Disiplin Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan. 405–424.
- Junianto, I., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 30–37.
- Mailantang, A. F. P., Gosal, R., & Kairupan, J. (2018). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa Batumbalango Dan Ensen Kecamatan essang selatan kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Meiningsih, M. R. (2016). Peranan camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Parindu Kabupaten sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(September).
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Teras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *EJournal Pemerintahan Integrattif*, 1(1), 106–120.
- Sumiati, & Riska, Y. (2021). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai dikantor Bupati Kabupaten Solok. 3(Desember), 473–482.
- Suwana, A., & Setyobudi, Y. farid. (2020). Kinerja Pemerintah Desa dalam PEbangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase Di Desa Parit Kecamatan Karimun

Timur Tahun 2018. *Trias Politika*, 4(1), 100–109.

Watkaat, A. J. (2020). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintahan Terhadap Mutu Pelayanan Di Desa Tumbuh Kecamatan Wartambrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Journal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki*, 2(1), 1–11.

sumber lainnya:

Efendi, B. (2002). *Pembangunan daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.

Sagian, S. P. (2003). *manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 203

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian* : Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015, h 329



L



A

N

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866-972, (0411) 593, Fax (0411) 866-528

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Shelsi Anubra  
NIM : 085611107618  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 12 Agustus 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah, S.Pd, M.Pd  
NPM. 064 591

AB I - Shelsi Anugra 105641107618

ORIGINAL TYPE REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ core.ac.uk

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography





BAB III - Shelsi Anugra 105641107618

ANALISALAHY IN PPT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ journal.unibos.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



### JAB IV - Shelsi Anugra 105641107618

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A table listing primary sources with their respective percentages. The table is partially overlaid by a large blue watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo.

Rank	Source	Percentage
1	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	5%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V - Shelsi Anugra 105641107618

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches





**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Faculty of Social and Political Sciences**

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 864 972 Fax: (0411) 865 598  
Official Email: deap@unismuh.ac.id  
Official Web: <https://fosp.unismuh.ac.id/>

Nomor : 0994/FSP/A.6-VIII/VI/1443 H/2022 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Shella Anugra

Stambuk : 105641107618

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Judul Skripsi : *"Anerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumulahu Khairan Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 17 Juni 2022

Dekan,

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 84-972 Fax. (0411) 965588 Makassar 90221 E-mail: ap1muhammad@upfesa.com



LP3M

or - 2170/05/C.4-VIII/VI/40/2022

18 Dzulq'adah 1443 H

1 - 1 (satu) Rangkap Proposal  
Permohonan Izin Penelitian  
Kepada Yth.

17 June 2022 M

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu  
di -

Enrekang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0994/FSP/A.6-VIII/VI/1443H/2022M tanggal 17 Juni 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SHELSIANUGRA

No. Stambuk : 105641107618

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juni 2022 s/d 21 Agustus 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

  
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp./Fax (0420)-21079*

**ENREKANG**

Enrekang, 20 Juni 2022

Nomor : 352/DP/PTSP/IP/VI/2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. Kepala Desa Parombean  
 D. Curio  
 Kec. Curio

Berdasarkan surat dan Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 2170/05/C.4-VIII/VI/40/2022 tanggal 17 Juni 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Shelsi Anugra  
 Tempat Tanggal Lahir : Rante, 14 Januari 2000  
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Bassarani Desa Rante Mario Kec. Malua

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di daerah/ Kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, tanggal 20 Juni 2022 s/d 21 Agustus 2022

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah dibenarkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG  
 Kepala DP/PTSP Kab. Enrekang

Dr. Ir. CHAIDAR BOLU, ST, MT  
 Pangkat: Pembina Tk. I  
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth

01. Bupati Enrekang (Berangkas/2)
02. Kepala BAKOSBANG-POL Kab. Enrekang
03. Camat Curio
04. Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
05. Yang bersangkutan (Shelsi Anugra)
06. Peninggal



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN CURIO  
DESA PAROMBEAN**

Alamat : Dusun To'cudu Desa Parombean ..... Kode Pos 91755

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 070/192/DP/KC/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ABDURRAHMAN ZAID R.S.Kom**

Jabatan : **KEPALA DESA PAROMBEAN**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SIHESI ANUGRA**

Tempat/Tanggal lahir : **Rante, 14 Januari 2000**

Pekerjaan : **Mahasiswi**

NIM : **105641107618**

Prodi : **Ilmu Pemerintahan**

Alamat : **Bassaran, Desa Rante Mario, Kec. Mahua Kab. Enrekang**

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang**" di Kantor Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada hari Rabu tanggal **6 Juli 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parombean, 6 Juli 2022

Kepala Desa Parombean

**ABDURRAHMAN ZAID R.S.Kom**



Foto Bersama Kepala Desa Parombean



Foto Bersama Ketua BPD



Foto bersama Kaur Perencanaan



Foto Bersama Masyarakat



Foto Bersama Masyarakat

## RIWAYAT HIDUP

**Shelsi Anugra**, lahir di Rante Pada tanggal 14 Januari 2000, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Sapruddin dan St. Maryam. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 2004 selanjutnya masuk jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2005-2011 di SDN 68 Bassaran, kemudian pada tahun 2011 masuk ke SMPN 6 Anggeraja dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 masuk di SMAN 5 Enrekang dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program strata satu (S1). Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.”**

